IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PENGENTASAN BUTA AKSARA DI KELURAHAN BANGKA BELITUNG LAUT KOTA PONTIANAK

Oleh: SISWANTO DAHMARI NIM. E01111026

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak. Tahun 2016.

Email:siswanto22@gmail.com

Abstrak

Penulisan artikel ini berdasarkan indikasi-indikasi masalah masih adanya masyarakat penyandang buta aksara di kelurahan Bangka Belitung Laut Kota Pontianak. Penulisan artikel ini menggunakan metode deskriftif dengan pendekatan kualitatif.Tujuan dari penulisan artikel ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses implementasi kebijakan program pengentasan buta aksara di Kelurahan Bangka Belitung Laut kota Pontianak. Dalam upaya menganalisis proses implementasi Program keaksaraan, penulis menggunakan teori dari Charles O. Jones yakni ada tiga pilar proses implementasi kebijakan yaitu: interpretasi, organisasi dan aplikasi. Dalam proses implementasi kebijakan program keaksaraan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), PKBM Ramadhan yang ada di wilayah Kelurahan Bangka Belitung Laut kota Pontianak. Hasil penelitian menunjukan bahwa Organisasi pada PKBM Ramadhan belum memadai dari segi infrasruktur juga keuangan karena untuk gedung tempat pelaksanaan pendidikan keaksaraan bukan gedung punya sendiri tetapi masih di gedung kelurahan, infrastruktur seperti meja dan kursi belum ada karena keterbatasan dana. Kemudian interpretasi tujuan dan isi yang dipahami masih adanya masyarakat yang tidak paham dengan pendidikan keaksaraan sehingga harus lebih menggalakkan sosialisasi kepada masyarakat terutama penyandang buta aksara. Selanjutnya Aplikasi/penerapan pelayanan kepada penyandang buta aksara tidak hanya di tempat pendidikan saja, akan tetapi pelayanan bersifat dinamis yang berarti dimana saja boleh diadakan pendidikan keaksaraan seperti di rumah-rumah warga keaksaraan. Saran penulis dalam penelitian ini supaya pemerintah setempat memperhatikan anggaran pendidikan nonformal keaksaraan agar PKBM yang ada memiliki infrastruktur gedung milik sendiri, serta peralatan perlengkapan lainnya seperti meja dan kursi yang harus di penuhi dalam menunjang keberhasilan dalam memberantas buta aksara, dan lebih meningkatkan sosialisasi terutama kepada penyandang buta aksara.

Kata-kata kunci: Implementasi Program, Kebijakan, Keaksaraan.

POVERTY PROGRAM IMPLEMENTATION POLICIES IN BLIND AKSARA VILLAGE BANGKA BELITUNG MARINE CITY PONTIANAK

Abstract

Writing this article is based on indications of the problem is still the existence of illiterate people in the village of Bangka Belitung Sea city of Pontianak. Writing this article uses descriptive method with qualitative approach. The aim of writing this article is to describe and analyze the policy implementation process illiteracy alleviation programs in Sub Bangka Belitung Sea city of Pontianak. In an attempt to analyze the process of implementation of the literacy program, the author uses the theory of Charles O. Jones that there are three pillars of the policy implementation process, namely: interpretation, organization and application. In the process of policy implementation of literacy programs by the Community Learning Center (PKBM), PKBM Ramadan in the region of the Pacific Islands Marine Village Pontianak city. The results showed that the Organization of Ramadan PKBM inadequate in terms of financial infrastructure as well as to the building where the implementation of literacy education is not the building but still has its own administrative buildings,

infrastructure such as tables and chairs has been no lack of funding. Then the interpretation of the purpose and content that is understood there are still people who are not familiar with literacy education should be encouraging more dissemination to the public, especially illiterate. Furthermore, application/ implementation services to illiterate people not only in education, but also the service is dynamic, which means anywhere be held literacy education as in the homes of citizens literacy. Suggestions authors in this study so that local governments pay attention to the education budget nonformal literacy so PKBM existing infrastructure owned building itself, as well as equipment other equipment such as tables and chairs that must be fulfilled in supporting the success in eradicating illiteracy, and further improve the dissemination, especially to persons with illiteracy.

Keywords: Implementation Program, Policy, Literacy.

A. PENDAHULUAN

Kota Pontianak merupakan ibu kota provinsi kalimantan barat dikenal sebagai pusatnya pendidikan di kalimantan barat. Berdasarkan undangundang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Provinsi Kalimantan Barat, pembangunan pembangunan pendidikan dan pelatihan serta pembangunan kesehatan merupakan investasi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga penting meningkatkan perannya dalam pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran. Pembangunan pendidikan dan pelatihan diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang berharkat, bermartabat, berakhlak mulia, dan menghargai keberagaman sehingga mampu bersaing dalam era global dengan

tetap berlandaskan pada norma kehidupan masyarakat dan tanpa diskriminasi.

Komitmen pemerintah terhadap pendidikan h<mark>arus</mark> tercermin pada kualitas manusia, peningkatan sumber daya kualitas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), serta politik anggaran terintegrasinya | seluruh pendidikan kedin<mark>asan ke dalam p</mark>erguruan tinggi. Pela<mark>yanan pendidikan yang mencakup</mark> semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. Oleh karena itu, perlu disediakan pendidikan dasar yang bermutu dan terjangkau disertai dengan pembebasan biaya pendidikan. Penyediaan pelayanan pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan sosial ekonomi Kalimantan Barat pada masa depan termasuk untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui pendalaman penguasaan teknologi.

Pembangunan pendidikan dan pelatihan diarahkan pula untuk menumbuhkan kebanggaan kebangsaan,

akhlak mulia, serta kemampuan peserta didik untuk hidup bersama dalam masyarakat yang beragam yang dilandasi oleh penghormatan pada hak-hak asasi manusia (HAM). Penyediaan pelayanan pendidikan sepanjang hayat sesuai perkembangan iptek perlu terus didorong untuk meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas penduduk Kalimantan Barat untuk memberikan termasuk bekal dan keterampilan bagi pengetahuan penduduk usia produktif yang jumlahnya semakin besar.

Undang-undang yang mengatur sistem pendidikan nasional yaitu undangundang No. 20 tahun 2003 atau yang dikenal dengan UU SISDIKNAS.Pendidikan nonformal sebagai sub sistem pendidikan nasional sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2003 berfungsi mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kebudayaan nasional serta mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.

Buta Aksara atau penyandang buta huruf antara lain disebabkan oleh adanya pertambahan penduduk buta huruf baru yang belum dicacah sebelumnya, adanya penduduk yang putus belajar sekolah dasar menjadi buta huruf kembali karena ketidakadaan bahan bacaan yang memadai dalam arti yang mampu membangkitkan minat baca masyarakat, luas wilayah pelayanan dan sulitnya transportasi mengakibatkan banyak warga masyarakat terlayani. belum Selain itu. yang banyaknya buta huruf disebabkan antara lain karena warga belum tahu manfaat nyata mengikuti pendidikan keaksaraan. Mereka pada umumnya sibuk bekerja mencari nafkah sehingga tidak memiliki waktu untuk belajar.

Penyelesaian masalah pendidikan tidak semestinya dilakukan secara tetapi harus terpisah-pisah, ditempuh langkah atau tindakan yang sifatnya menyeluruh. Artinya, kita tidak hanya memperhatikan kepada kenaikkan anggaran saja. Sebab percuma saja, jika kualitas Sumber Daya Manusia dan mutu pend<mark>idikan</mark> masih rendah. Masalah penyelenggaraan Wajib Belajar Sembilan tahun sejatinya masih menjadi pekerjaan besar bagi.

Kemampuan pemerintah (dalam penyediaan dana) yang terbatas. Pemerintah harus menyediakan anggaran pendidikan mininmal 20% APBDnya, namun anggaran tersebut sering diselewengkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Bahkan, gara-gara minimnya perhatian maupun anggaran untuk pembangunan fisik, infrastruktur belum begitu optimal, Pasal 49, ayat 1: menyatakan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Keberadaan PKBM sangat penting karena selama ini memberi kontribusi banyak terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), di membantu memfasilitasi antaranya penanganan warga buta huruf karena putus melalui penyelenggaraan sekolah pendidikan program keaksaraan yang bertujuan mengurangi angka warga buta huruf. Kurang optimalnya kepedulian pemerintah terhadap lembaga PKBM dimungkinkan karena lembaga tersebut dibentuk atas dasar kebutuhan masyarakat, bukan karena inisiatif dari pemerintah.

B. KAJIAN PUSTAKA

Menurut Charles O. Jones dalam pengantar kebijakan publik oleh Nasir Budiman (1996:304) mengemukakan tiga kegiatan yang menjadi pilar dalam implementasi yaitu:

1. Organisasi

Tahapan pengorganisasian merupakan suatu upaya untuk membentuk dan menata kembali sumber daya, unti-unti dan metode-metode untuk menjadikan program berjalan serta mengarah pada upaya mewujudkan kebijakan menjadi hasil sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan. Dalam tahapan pengorganisasian terjadi proses pengaturan dan penetapan siapa yang menjadi pelaksana kebijakan (Sumber Daya Manusia), penetapan anggaran, penetapan sasaran dan prasarana untuk melaksanakan kebijakan hingga penetapan pola kepemimpinan dan koordinasi kebijakan.

Pelaksana kebijakan sangat tergantung pada jenis kebijakan apa yang akan dilaksanakan, namun setidaknya dapat diidentifikasi. Setiap melaksanakan kebijakan perlu ditetapkan SOP sebagai pedoman, petunjuk, tuntunan dan refrensi kebijakan bagi pelaku agar mereka men<mark>getahui apa yang har</mark>us disiapakan dan dilakukan, siapa sasarannya, dan hasil apa yang ingin dicapai dari pelaksanaan kebijakan tersebut, selain itu SOP juga dapat digunakan untuk mencegah timbulnya perbedaan dalam bersikap dan bertindak ketika dihadapkan pada permasalahan ketika menjalankan kebijakan oleh karena itu, setiap kebijakan yang dibuat prosedur tetap (protap) atau prosedur baku berupa standar prosedur standar pelayanan dan atau operasi minimal (SPM).

Dengan demikian birokrasi adalah pengaktif tatanan rasional dari segala sesuatu, dan bagi Weber demokrasi memainkan peran terpenting dalam hal ini. Dalam pandangan yang demikian, birokrasi tidak terlalu diharapkan untuk menghasilkan kreativitas yang besar maupun kebijakan yang inovatif.

2. Interpretasi

Suatu tahapan untuk menafsirkan menjadi rencana dan program suatu suatu pengarahan dengan merupakan bahasa sederhana serta mudah dipahami sehingga dapat dilaksanakan dan dapat diterima oleh para pelaku dan sasaran kebijakan sangat tergantung | pada penafsiran dalam memahami apa yang sebenarnya dikerjakan. Keberhasilan interprestasi tidak terlepas pula dari peran sosialisasi.

Memahami isi dan tujuan dari sebuah kebijakan sangat diperlukan untuk terselenggaranya atau terlaksananya kebijakan tersebut. Pemahaman ini dan tujuan ini harus dilakukan oleh para implementor dan disampaikan kepada masyarakat terutama sasaran kebijakan.

Pelaksanaan program yang efektif nampaknya menjadi aneh apabila faktor kejelasan dijadikan salah-satu prasyarat. Memang ada hukum atau tidak tertulis yang menyatakan bahwa kian rumit suatu permasalahan sosial, kian kian mendua (ambigu) pula kebijakan sosial. Kegandaan (ambiguitas) ini akan mengantarkan para pelaksana pada kebijakan mereka sendiri, meskipun mereka tidak perlu menggunakannya untuk memperluas otoritas yang dimiliki. Tetapi sebaliknya, mereka menggunakan hal ini untuk menghindari permasalahan khusus yang sulit.

3. Aplikasi (Penerapan)

Penerapan adalah tahapan pelaksanaan dari perencanaan kebijakan yang telah dirumuskan kedalam realitas nyata yang berbentuk suatu kegiatan menetapkan peraturan atau dengan petunjuk pelaksana, dan dilengkapi dengan prosedur kerja yang jelas, program kerja serta jadwal kegiatan. Penerapan merupakan suatu proses dinamis dimana para pelaksananya ataupun para petugas diar<mark>ahkan oleh pedoman</mark> program.

Program yang dimaksud dalam hal ini adalah pedoman yang telah ditetapkan istansi dalam oleh kantor atau melaksanakan kebijakan yang telah dibuat. Pelaksana yang bersifat dinamis ini adalah pelaksanaan yang bersifat proses pendidikan keaksaraan yang tidak hanya mengacu kepada hari kerja saja dan di kantor saja, namun adanya pola lain yang dilakukan untuk mempermudah masyarakat dalam mengikuti pendidikan keaksaraan.

Gambar 1 Kerangka Pikir

Masalah: Masih banyaknya penyandang buta aksara

Tiga pilar aktivitas implementasi kebijakan menurut Charles O. Jones (dalam widodo 2008) yaitu: *Organization, Interpretation*, dan *Application*.

Tujuan:

Mendeskripsikan sejauh mana proses implementasi pengentasan buta aksara terlaksana.

Sumber: Data penelitian tahun 2015

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian (dalam Sugiyono:2010) metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu, rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti caracara yang dilakukan itu dapat diamati oleh

indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan.

Penelitian ilmiah dapat diartikan sebagai suatu kegiatan untuk menemukan iawaban dan menjelaskan suatu permasalahan diteliti yang guna menemukan pemecahan dari masalah tersebut. Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang sangat penting bagi pengembangan ilmu dan pemecahan suatu masalah (Satori dan Komariah 2011).

Jenis penelitian yang digunakan <mark>d</mark>alam penelit<mark>ian</mark> ini adalah deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menggamb<mark>arkan,</mark> meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada dimasyarakat menjadi yang obyek pene<mark>litian dan berupaya</mark> menarik realitas itu kepermukaan yang bertujuan untuk menggambarkan tentang suatu ciri atau karakter, dan sifat tentang fenomena tertentu.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif sering juga disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting). Penelitian ilmiah adalah upaya untuk menjelaskan fenomena nyata yang kita alami dengan menetapkan prinsip umum untuk menerangkannya.

Penelitian kualitatif menurut Satori dan Komariah (2011:22) adalah penelitian yang menekankan pada quality atau hal yang penting dari sifat suatu barang/jasa. Hal terpenting dari suatu barang atau jasa berupa kejadian/fenomena/gejala sosial adalah makna dibalik kejadian tersebut yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi pengembangan konsep teori, jangan sampai suatu yang berharga tersebut berlalu bersama waktu tanpa manfaat. meninggalkan Penelitian dapat didesain untuk kualitatif memberikan sumbangan terhadap teori, praktis, kebijakan, masalah-masalah sosial dan tindakan.

D. PEMBAHASAN

1. Organisasi

Tahapan pengorganisasian merupakan suatu upaya untuk membentuk dan menata kembali sumber daya, unit-unit dan metode-metode untuk menjadikan program berjalan serta mengarah pada upaya mewujudkan kebijakan menjadi hasil sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan. Dalam tahapan pengorganisasian terjadi proses pengaturan dan penetapan siapa yang menjadi pelaksana kebijakan (Sumber Daya Manusia), penetapan anggaran, penetapan sasaran dan prasarana untuk

melaksanakan kebijakan hingga penetapan kepemimpinan koordinasi pola dan kebijakan. Dalam proses implementasi dipilih program harus orang orang/sumber daya manusia yang memang mempunyai keahlian, karena orang-orang yang dipilih ini yang akan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program. Selain ahli, sumber daya juga harus terampil dan memang layak sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat. Sumber daya sebagai pelaku kebijakan harus mengetahui dengan baik mengenai tujuan dan pentingnya program dilaksanakan sehingga tercipta kepatuhan dan kesadaran diri dari sumber daya untuk menduk<mark>ung penuh jalanny</mark>a suatu program. Setelah ditetapkan siapa yang menjadi pelak<mark>u kebijakan, lang</mark>kah selanjutnya adal<mark>ah menetapkan berap</mark>a besar anggaran dan dari mana sumber anggaran itu berasal serta menentukan peralatan apa yang dibutuhkan pelaksanaan guna kebijakan/program.

2. Pelaksana Kebijakan

Implementor atau pelaksana kebijakan yang ada dilapangan adalah aktor-aktor yang ada pada lembagalembaga pemerintah yang berperan dalam penyelengaraan pendidikan keaksaraan seperti PKBM, LPM dan masih banyak lagi lembaga masyarakat yang turut membantu dan mendukung pemerintah

dalam pengentasan buta aksara yang ada di kota Pontianak. Pelaksanaan program pendidikan keaksaraan semakin meningkat dengan diterbitkan lnstruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Aksara Buta (GNPPWB/PBA). Selama kurun waktu tersebut telah banyak hal yang dilakukan, baik yang menyangkut kebijakan sebagai lanjut Inpres, maupun tindak berkaitan dengan pelaksanaannya. Inpres Nomor 5 Tahun 2006 lahir sebagai respon Pemerintah terhadap pentingnya memenuhi amanat konstitusi di bidang pendidikan yang kemudian diwujudkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis (Renstra) Pendidikan Nasional. Dalam RPJMN dan Renstra Pendidikan dan Kebudayaan tersebut, Pemerintah bertekad menurunkan angka buta aksara usia 15 tahun ke atas demi menuntaskan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.

3. Penetapan Manajemen Pelaksanaan Kebijakan

Manajemen pelaksanaan kebijakan dalam hal ini lebih ditekankan pada penetapan pola kepemimpinan dan koordinasi dalam melaksanakan sebuah kebijakan. Apabila pelaksanaan kebijakan melibatkan lebih dari satu lembaga (pelaku kebijakan) maka harus jelas dan tegas pola kepemimpinan yang digunakan, apakah menggunakan pola kolegial, atau ada salah lembaga yang ditunjuk sebagai koordinator. Bila ditunjuk salah satu di antara pelaku kebijakan untuk menjadi koordinator biasanya lembaga yang terkait erat dengan pelaksanaan kebijakan yang diberi tugas sebagai leading sector bertindak sebagai koordinator dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Melihat struktur organisasi yang digunakan oleh PKBM "Ramadhan" yaitu menggunak<mark>an struktur o</mark>rganisasi garis. Garis komando selalu dari atas ke bawah, dan garis koordinasi dilaksanakan secara timb<mark>al balik baik dari ke</mark>tua langsung ke bawah maupun sebaliknya. Fungsi manajemen juga diterapkan dalam menjalankan lembaga ini. Fungsi manajemen yang dilaksanakan antara lain palanning, organizing, actuating controling (POAC). Dalam melaksanakan program lembaga selalu mengacu kepada fungsi manajemen yang digunakan.

4. Sumber Daya Keuangan dan Peralatan

Besarnya anggaran untuk melaksanakan kebijakan tentunya sangat tergantung kepada macam dan jenis kebijakan yang akan dilaksanakan. Namun sumber setidaknya dapat anggaran ditetapkan antara lain berasal dari pemerintah pusat (APBN), APBD, sektor swasta, swadaya masyarakat, dan lain-lain. Demikian pula macam, jenis dan besar kecilnya peralatan yangdiperlukan sangat bervariasi dan tergantung kepada macam dan jenis kebijakan yang akan dilaksanakan. Meskipun demikian, yang untuk diketahui penting lebih ditegaskan adalah untuk melaksanakan kebijakan perlu didukung oleh peralatan yang memadai. Tanpa peralatan yang dan memadai cukup akan dapat mengurangi efektifitas dan efisiensi dalam melaksanakan kebijakan. Sumber daya keuangan adalah kebutuhan yang mendasar bagi setiap instansi/organisasi pemerintahan, keuangan setiap instansi mampu dan bisa menjalankan tugas dan fungsinya. Dinas kota pendidikan pontianak adalah suatu badan yang memberikan dukungan keuangan kepada setiap PKBM yang ada sebagai modal untuk menjalankan pendidikan keaksaraan.

5. Sumber Daya Prasarana

Sumber daya sarana dan prasarana pendidikan keaksaraan dasar diupayakan sesuai dengan ketentuan dalam standar sarana dan prasarana pendidikan keaksaraan. Setiap penyelenggara

pembelajaran pada pendidikan keaksaraan dasar dapat memanfaatkan sarana yang tersedia di lingkungan sekitar untuk menunjang proses pembelajaran. Proses belajar mengajar dapat dilaksanakan di gedung-gedung sekolah, balai desa, tempat ibadah, rumah penduduk, atau fasilitas lain yang layak dan memenuhi syarat untuk kegiatan pembelajaran keaksaraan.

Sumber daya prasarana merupakan sarana yang digunakan untuk operasional implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang akan memudahkan semuanya dalam dalam memberikan pelayanan kebijakan. Terbatasnya implementasi i fasilitas dan peralatan yang diperlukan dalam proses pendidikan keaksaraan men<mark>yebabkan tidak optim</mark>alnya pelayanan yang <mark>diberikan.</mark>

6. Pelaksanaan Bersifat Dinamis

Jadwal pelaksanaan atas pelaksanaan suatu kebijakan juga sangat beragam. Setidaknya kontrol internal jadwal pelaksanaan dapat ditetapkan setiap bulan. Namun untuk eksternal, jadwal kegiatan sulit dilakukan penjadwalan karena pelakunya di luar organisasi maka sulit untuk diintervensi. Pelaksanaan bersifat dinamis ini adalah adanya pelaksanaan proses pendidikan keaksaraan yang tidak hanya mengacu kepada jam

kerja saja melainkan juga melaksanakan di lapangan langsung.

7. Isi Tujuan yang di pahami

Suatu tahapan untuk menafsirkan suatu program menjadi rencana merupakan suatu pengarahan dengan bahasa sederhana serta mudah dipahami sehingga dapat dilaksanakan dan dapat diterima oleh para pelaku dan sasaran sangat tergantung kebijakan penafsiran dalam memahami apa yang sebenarnya dikerjakan. Keberhasilan interprestasi tidak terlepas pula dari peran sosialisasi. Memahami isi dan tujuan dari sebuah kebijakan sangat diperlukan untuk terselenggaranya atau terlaksananya kebijakan tersebut. Pemahaman ini dan tujuan ini harus dilakukan oleh para implementor dan disampaikan kepada masyarakat terutama sasaran kebijakan. Yang menjadi titik perhatian utama sekarang adalah pembuatan hukum atau perundangan tidak memasukan proses kebijakan didalamnya walaupun kita memiliki sesuatu yang disebut Theodore J. Lowi sebagai terbit hukum (the rule of law) dalam bukunya publik policy dengan dikutip oleh Charles O. Jones. Suatu patokan yang jelas harus segera ditetapkan yang mana melibatakan, pada batas minimum, suatu proses yang harus dipelajari oleh para pelaksana untuk kemudian mengembangkan sarana untuk

menerapkannya. Tetapi sebaliknya, manakala patokan tersebut tak jelas, para pelaksana akan menghadapi tanggung jawab yang lebih berat. Bagaimana mereka menanggapi tanggung jawab ini tergantung dari sejumlah keadaan. Yang pasti hal terpenting dalam masalah ini adalah perkiraan para pelaksana tersebut tentang kesediaan sumber daya.

8. Aplikasi (Penerapan)

adalah Penerapan tahapan pelaksanaan dari perencanaan kebijakan yang telah dirumuskan kedalam realitas nyata yang berbentuk suatu kegiatan peraturan dengan menetapkan atau petunju<mark>k pelaksana, dan d</mark>ilengkapi dengan prose<mark>dur kerja yang jelas, program kerja</mark> kegiatan. Penerapan serta jadwal mer<mark>upakan suatu proses</mark> dinamis dimana para pelaksananya ataupun para petugas diarahkan 💮 oleh pedoman program. Program yang dimaksud dalam hal ini adalah pedoman yang telah ditetapkan oleh kantor atau istansi dalam melaksanakan kebijakan yang telah dibuat. Pelaksana yang bersifat dinamis ini adalah bersifat pelaksanaan yang proses pendidikan keaksaraan yang tidak hanya mengacu kepada hari kerja saja dan di kantor saja, namun adanya pola lain yang dilakukan untuk mempermudah masyarakat dalam mengikuti pendidikan keaksaraan.

E. PENUTUP

a) Kesimpulan

Berdasarkabn hasil penelitian di Bab IV (empat) dapat di simpulkan:

- 1. Organisasi pada PKBM Ramadhan keuangan Sumber daya pengelola sumber keuangan belum merasa mencukupi untuk menunjang pelaksaan pendidikan keaksaraan, karena dana untuk pendidikan non formal sangat dibandikan dana kecil dialokasikan untuk pendidikan formal, berharap bahwa mereka sangat pemerintah terus mensuport dalam hal keuangan agar dalam pelaksanaan pelayanan menjadi lebih optimal dalam masyarakat. Sarana dan prasarana sudah mencukupi termasuk buku-buku paket alat tulis untuk peserta keaksaraan, namun di lain pendidikan sisi keaksaraan membutuhkan adanya gedung sendiri dalam pelaksanaan pendidikan keaksaraan sehingga tidak dan mengontrak di menumpang bangunan milik orang lain, untuk kursi dan meja harus pengadaan membuat usulan berupa proposal itulah yang di lakukan untuk pemenuhan sarana dan prasaran dalam PKBM keaksaraan.
- Interpretasi berdasarkan tujuan yang di pahami dari kebijakan program pendidikan keaksaraan yang di buat

- tersebut untuk pengentasan buta aksara, ketidakpahaman masih adanya masyarakat yang buta aksara terhadap program keaksaraan tetapi mau berpartisipasi dalam pendidikan keaksaraan. Tanggapan dari pengelola atau ketua PKBM Ramadan, tutor keaksaraan dan tokoh masyarakat menyatakan paham terhadap program sangat mendukung dan keaksaraan, sangat menerima adanya program tersebut karena program tersebut sangat di prioritaskan kepada buta aksara, sehingga yang tidak bisa mengenal huruf dan angka, calistung (membaca, menulis dan berhitung menjadik bisa karena diadakan program keaksaraan tersebut.
- 3. Aplikasi/Penerapan Sosialisasi dari program keaksaraan tersbut pengelola dan kepengurusan PKBM bekerja sama dengan kecamatan, kelurahan RT dan RW dalam mensosialisasikan kepada masyarakat dan masyarakat memberikan dukungan yang cukup baik sehingga pendidikan keaksaraan bisa diselenggarakan. Namun permasalahannya terkadang harus antar jemput ke tempat masyarakat yang buta aksara untuk mengikuti pendidikan keaksaraan, masih adanya masyarakat yang meminta ganti rugi karena telah menyita waktu kerja mereka. Kegiatan belajar sangat tergantung pada

pendekatan pendidikan penerapan partisipatif yang mengharuskan peserta keaksaraan aktif dalam pendidikan, kemampuan tutor dalam memotivasi, mengarahkan dan membimbing peserta dalam kegiatan belajarnya. Pengalaman menunjukkan bahwa kegiatan menulis perlu didahulukan dari pada kegiatan membaca, karena melalui kegiatan menulis, peserta belajar sedikit demi sedikit langsung belajar membaca, kemampuan menulisnya maka cenderung kurang terampil. Standar kompetensi keaksaraan dasar mengacu kepada kurikulum tahun 2015 yang mencakup belajar membaca dan menulis, belajar huruf dan mengenal angka semua sudah disajikan dalam bentuk kompetensi keaksaraan.

b) Saran

Untuk dapat menjangkau masyarakat dan menerapkan pelayanan lebih luas lagi dan dalam meningkatkan pelayanan yang akan diberikan oleh karena itu, mari bangun dan membina kerjasama yang lebih banyak lagi dengan organisasiorganisasi yang berkaitan dengan pelaksanaan program, seperti peningkatan pendidikan keaksaraan bagi peserta yang buta aksara dalam mengikuti pendidikan keaksaraan dan meningkatkan keterampilan membaca, menulis berhitung

bagi buta aksara sehingga dalam kehidupan sehari-hari menjadi lebih baik.

- Organisasi, sebuah Organisasi tidak bisa berdiri jika sumber daya yang dimiliki masih belum mencukupi terutama dalam mendukung pelaksanaan pendidikan keaksaraan. Untuk pemerintah supaya lebih memperhatikan kebijakan pendidikan non formal agar tetap berajalan demi kesejahteraan masyarakat, struktur organisasi sebaiknya menambah tenaga untuk mengelola sarana d<mark>an p</mark>rasarana terutama dalam persiapan dalam pelaksanaan program pendidikan keaksaraan yang akan di selenggarakan pada setiap Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang ada pada lingkup kecamatan Pontianak Tenggara terutama yang berkaitan dengan peminjaman bukubuku paket pelajaran maupun pembacaan buku lebih agar terkoordinir dengan baik.
- Interpretasi terkait pemahaman instansi agar lebih dapat memberikan bantuan baik berupa bimbingan pelaksanaan program maupun dalam insentif hal dana guna untuk mendapatkan tempat sendiri dalam menambah sarana dan prasarana dalam menjalankan PKBM yang di selenggarakan. Agar dalam menyusun dan merencanakan program kerja yang

akan dilaksanakan lebih menitikberatkan kepada aspek bagaimana meningkatklan skill atau keterampilan masyarakat atau warga yang mengikuti pendidikan keaksaraan sehingga lebih bermanfaat bagi masyarakat.

c) Aplikasi/Penerapan

Dalam pengaplikasian yaitu tidak sosialisasi semua masyarakat mengetahui program pendidikan keaksaraan, harapan kepada PKBM agar tidak henti-hentinya mensosialisasikan program pendidikan keaksaraan kesetaraan atau pendidikan keaksaraan agar tidak dipandang sebelah mata oleh masyarakat umum dikarenakan termasuk dalam Terlebih nonformal. pendidikan mereka yang telah menyelesaikan pendidikan keaksaraan.

F. REFERSNSI

1. Buku-Buku

Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar* **Kebijakan** *Publik*. Bandung: Alfabeta. Budiman, Nashir. 1996. **Pengantar kebijakan publik** (*public policy*). Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Fakhrurozi, Jafar. 2009. *Buta Asara dan Kesejahteraan Rakyat*. Semarang:

Islamy, M Irfan. 2001. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara

Nugroho, Riant D. 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. PT. Elex Media Komputindo: Jakarta

_____. 2006. *Public policy*. Jakarta: PT. Gramedia.

Satori, Dja'am dan Komariah, Aan. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono, 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Subarsono, A.G. 201<mark>0. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi.</mark> Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Widodo, Joko. 2008. Analisis kebijakan publik. Malang: Bayu Media.

2. Dokumen Peraturan:

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pontianak, Nomor: 545.A/Kep/Tahun 2014. Nomor: 345.A/Kep/Tahun 2014. Tentang Penetapan LKP (Lembaga Kursus Dan Pelatihan) Dan PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat)

Peraturan Menteri Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Dan Pemberantasan Buta Aksara.



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK PENGELOLA JURNAL MAHASISWA

Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak Kotak Pos 78124 Homepage: http://jurmafis.untan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yar	ng bertanda tangan di bawah ini, saya:
Nama Lengkap NIM / Periode lulus Ed 1111026 / The samples Lotte Fakultas/ Jurusan E-mail addres/ HP SISWANTO Dahmouri Ed 1111026 / The samples Lotte Ed 1111026 / The samples Lotte SISWANTO Dahmouri Ed 1111026 / The samples Lotte SISWANTO Dahmouri Ed 111026 / The samples Lotte Ed 111026 / The samples Lotte	Negaron 808 808 25
demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuha menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal I. A. H. Fakultas Ilmu sosial dan Royalti Non-eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Rig	Mahasiswa
Implementasi kebijakan Program di Kelurahan Bangka Belitung	Pengentasan Buto Aksaro Laut kofa Pontianak
beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-k (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ me Secara fulltex content artikel sesuai dengan standar penulis ju	kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data empublikasikannya di Internet atau media lain):
untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu memint saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang b	ta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama
Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipt	
Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebena	ırnya.
Mengetahui Ametujui Pengelola Jurnal	Dibuat di : Pontianak Pada tanggal : 1702-2016
Dr. Aritary M. AB. W.B. 19. 19. 1002	SIS Wanto Dahman NIM. EO 1111026
Cotatan .	

Catatan:

*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing
(Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)